

ANALISIS STRATEGI KERJA SAMA PANGAN INDONESIA-THAILAND DALAM MENDUKUNG STABILITAS PANGAN REGIONAL

INDONESIA'S STRATEGY IN FOOD COOPERATION WITH THAILAND TO MAINTAIN FOOD STABILITY IN SOUTHEAST ASIA

Andhara Refa Yunia Utari^{1*}, Fitri Yanti², Yulia Rimapradesi³

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

(andhararefa@gmail.com¹, fitriyanti199456@gmail.com²,
yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id³)

*Corresponding Author

Abstrak – Ketahanan pangan merupakan isu strategis di kawasan Asia Tenggara, terutama bagi Indonesia yang menghadapi tantangan dalam ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Thailand, sebagai eksportir beras terbesar di kawasan, menjadi mitra penting dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Indonesia dalam menjalin kerja sama pangan dengan Thailand serta kontribusinya terhadap stabilitas pangan di Asia Tenggara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan publikasi resmi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia–Thailand tidak hanya mencakup perdagangan beras, tetapi juga kolaborasi teknis dalam riset pertanian, transfer teknologi, dan mekanisme cadangan beras regional seperti ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Strategi diplomasi pangan Indonesia mencerminkan sinergi antara diplomasi ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan solidaritas kawasan. Implementasi kerja sama ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketersediaan dan stabilitas pangan nasional, serta memperkuat integrasi kebijakan pangan di ASEAN. Dengan demikian, kerja sama Indonesia–Thailand dapat menjadi model kolaborasi regional dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di Asia Tenggara.

Kata Kunci: ASEAN, diplomasi pangan, indonesia, ketahanan pangan, Thailand.

Abstract – Food security has become a strategic issue in Southeast Asia, particularly for Indonesia, which faces challenges in ensuring food availability and stability. Thailand, as the region's largest rice exporter, serves as a key partner in strengthening Indonesia's food resilience. This study aims to analyze Indonesia's strategies in food cooperation with Thailand and its contribution to regional food stability in Southeast Asia. Using a qualitative descriptive-analytical approach, this research draws upon secondary data from academic journals, international organization reports, and ASEAN publications. The findings reveal that Indonesia–Thailand cooperation extends beyond rice trade, encompassing technical collaboration in agricultural research, technology transfer, and regional rice reserve mechanisms such as the ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Indonesia's food diplomacy strategy reflects a synergy between economic, developmental, and humanitarian diplomacy oriented toward sustainability and regional solidarity. The implementation of this cooperation has positively impacted national food availability and stability while strengthening ASEAN's integrated Food Security Framework. Therefore, the Indonesia–Thailand partnership can serve as a model of regional collaboration for achieving a resilient, inclusive, and sustainable food system in Southeast Asia.

Keywords: ASEAN, food diplomacy, indonesia, food security, Thailand.

Pendahuluan

Ketahanan pangan (*food security*) merupakan isu strategis yang semakin mendapat perhatian dalam dinamika global dan regional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi yang pesat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah memberikan tekanan signifikan terhadap sistem pangan di kawasan ini. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan populasi lebih dari 660 juta menghadapi tantangan besar dalam menjamin ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakatnya. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas dalam jangka panjang (The State of Food Security and Nutrition in the World 2021., 2021). Oleh karena itu, ketahanan pangan tidak lagi dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan telah berkembang menjadi bagian penting dari keamanan manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Studi menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap produktivitas

pertanian di kawasan, khususnya melalui peningkatan frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan yang mengganggu stabilitas produksi pangan (Lin et al., 2022). Selain itu, meningkatnya pendapatan masyarakat ASEAN turut mendorong perubahan pola konsumsi yang meningkatkan permintaan terhadap pangan, sehingga menambah tekanan pada sistem produksi regional (Sundram, 2023). Ketergantungan beberapa negara terhadap impor pangan juga memperbesar kerentanan terhadap gangguan eksternal, seperti krisis global atau disrupsi rantai pasok, sebagaimana terlihat selama pandemi COVID-19 (The State of Food Security and Nutrition in the World 2021., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di kawasan tidak dapat diselesaikan secara unilateral, melainkan membutuhkan koordinasi dan kerja sama antarnegara.

Pendekatan ini bukan sekadar wacana teknis, melainkan mandat konstitusional dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa kedaulatan pangan harus berbasis pada kemandirian dan hak atas pangan bagi setiap warga negara. Secara

praktis, strategi multidimensi diimplementasikan melalui koordinasi lintas sektoral yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, di mana penguatan cadangan pangan nasional harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur irigasi dan sistem logistik untuk menekan disparitas harga antarwilayah. Urgensi pendekatan ini semakin nyata mengingat laporan FAO dalam *The State of Food Security and Nutrition in the World (2023)* menyoroti bahwa kerentanan pangan global saat ini dipicu oleh interaksi kompleks antara konflik, guncangan ekonomi, dan perubahan iklim ekstrem, yang mengharuskan negara seperti Indonesia untuk beralih dari sekadar mengejar angka produksi menuju penguatan resiliensi sistem pangan dari hulu hingga hilir.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tekanan tinggi dalam menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Namun, tantangan efisiensi tetap menjadi hambatan utama, meskipun produksi beras nasional pada tahun 2025 mencatat rekor tertinggi di ASEAN mencapai 34,69 juta ton (naik 13,29% dari tahun sebelumnya), rata-rata

produktivitas per hektar kita masih berada di angka 6,37 ton/ha. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi produksi pertanian Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara produsen utama seperti Thailand (Herliana et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan Indonesia tidak dapat hanya bergantung pada kapasitas domestik, tetapi juga memerlukan dukungan kerja sama eksternal.

Pandemi COVID-19 semakin memperjelas kerentanan sistem pangan Indonesia. Gangguan rantai pasok, pembatasan mobilitas, dan fluktuasi harga pangan dunia menghambat distribusi serta akses terhadap bahan pangan pokok. Pandemi juga menunjukkan betapa rentannya sistem pangan ASEAN terhadap krisis global, termasuk dalam hal logistik dan perdagangan lintas batas (ASEAN Responses to COVID-19 for Assuring Food Security, 2021). Oleh karena itu, memperkuat kerja sama regional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kestabilan pangan nasional maupun kawasan.

International Rice Research Institute (IRRI) mencatat Thailand sebagai pengeksport beras terbesar kedua di

dunia pada tahun 2024. Keberhasilan Thailand dalam mempertahankan surplus produksi didukung oleh kebijakan pertanian yang konsisten, sistem irigasi yang relatif maju, serta dukungan pemerintah terhadap sektor agrikultur (Sundram, 2023). Posisi ini menjadikan Thailand sebagai mitra penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Tidak hanya dalam bentuk perdagangan beras, kerja sama antara kedua negara juga mencakup pertukaran teknologi pertanian, riset bersama, serta peningkatan kapasitas produksi. Dengan keunggulan komparatif yang dimiliki Thailand, kolaborasi bilateral berpotensi memberikan manfaat strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di kawasan.

Urgensi kerja sama Indonesia–Thailand semakin nyata mengingat tantangan pangan yang dihadapi kawasan ASEAN. Sejumlah kebijakan regional, seperti *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) dan *ASEAN Food Security Information System* (AFSIS), menunjukkan komitmen bersama negara-negara anggota dalam memperkuat koordinasi dan berbagi sumber daya.

Pandemi COVID-19 juga menjadi pelajaran penting bagi ASEAN untuk

mengembangkan sistem pangan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, kerja sama bilateral Indonesia–Thailand dapat menjadi model efektif dalam menjaga stabilitas pangan kawasan, terutama karena keduanya memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi, yaitu Thailand sebagai eksportir utama dan Indonesia sebagai pasar terbesar.

Dengan melihat kondisi tersebut, kerja sama pangan Indonesia dan Thailand bukan hanya berfungsi untuk memperkuat kapasitas nasional masing-masing negara, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem perdagangan pangan, memperluas jaringan logistik, serta mendorong pertukaran teknologi pertanian modern yang mendukung keberlanjutan produksi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi kerja sama pangan Indonesia dengan Thailand serta mengevaluasi kontribusi strategi tersebut terhadap stabilitas pangan regional di Asia Tenggara berdasarkan dimensi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji strategi Indonesia dalam kerja sama pangan dengan Thailand serta kontribusinya terhadap stabilitas pangan kawasan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena kebijakan dan dinamika kerja sama antarnegara yang bersifat kontekstual dan tidak dapat direduksi menjadi variabel kuantitatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi kebijakan secara sistematis berdasarkan interpretasi data yang tersedia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi jurnal ilmiah terindeks, laporan lembaga internasional (FAO, World Bank), dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi ASEAN dalam rentang waktu 2020–2025. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan data guna memastikan validitas informasi yang digunakan.

Prosedur pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan.

Pertama, reduksi data dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, proses kategorisasi dan coding untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti bentuk kerja sama, strategi diplomasi, dan dampaknya terhadap ketahanan pangan. Ketiga, penyajian data dalam bentuk narasi analitis untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Selain itu, hanya sumber yang berasal dari lembaga terpercaya dan jurnal bereputasi yang digunakan sebagai dasar analisis guna meminimalkan bias.

Analisis difokuskan pada empat dimensi ketahanan pangan, yaitu *availability* (ketersediaan), *access* (akses), *utilization* (pemanfaatan), dan *stability* (stabilitas), sebagai kerangka analisis untuk menilai kontribusi kerja sama Indonesia–Thailand terhadap ketahanan pangan regional.

Kerangka Analisis

Konsep ketahanan pangan (*food security*) merupakan salah satu isu

penting dalam keamanan non-tradisional yang menuntut kerja sama antarnegara di tingkat global maupun regional. Definisikan dari ketahanan pangan yaitu kondisi ketika seluruh individu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat.

Konsep ketahanan pangan mencakup empat dimensi utama, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas, yang secara keseluruhan menentukan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya (Konsep & Dan, 2002). Pendekatan ini menjadi dasar dalam menganalisis kerja sama pangan antara Indonesia dan Thailand. Dalam konteks hubungan internasional, isu pangan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari strategi diplomasi dan keamanan nasional (Sundram, 2023). Pendekatan ini berpijak pada teori *interdependence liberalism*, yang menyoroti bahwa negara-negara saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, kolaborasi antarnegara diperlukan untuk menciptakan stabilitas dan ketahanan kawasan. Dalam konteks ASEAN, kerja

sama pangan menjadi salah satu prioritas utama melalui inisiatif seperti ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) dan ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan regional melalui cadangan pangan bersama dan koordinasi kebijakan (Pinasthika, 2024).

Selain itu, teori *economic diplomacy* juga relevan dalam menganalisis strategi Indonesia dalam menjalin kerja sama pangan dengan Thailand. Menurut Herliana et al. (2025), diplomasi ekonomi memungkinkan negara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan kepentingan nasional melalui perdagangan strategis, negosiasi bilateral, dan kolaborasi teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan dua kerangka teori utama, yaitu *Food Security Framework* dan *economic diplomacy theory*, untuk memahami bagaimana strategi Indonesia dalam kerja sama pangan dengan Thailand berkontribusi terhadap stabilitas pangan di Asia Tenggara.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Hubungan dan Kerja Sama Pangan Indonesia–Thailand

Hubungan Indonesia dan Thailand dalam sektor pangan merupakan salah satu pilar penting dalam upaya

memperkuat ketahanan pangan regional di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki posisi yang saling melengkapi, Thailand sebagai eksportir beras terbesar di kawasan, dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menjadi pasar potensial sekaligus negara dengan tantangan ketahanan pangan yang cukup kompleks. Kolaborasi Indonesia–Thailand melalui *ASEAN Integrated Food Security Framework* (AIFS) merupakan langkah nyata dalam memperkuat kapasitas domestik Indonesia menghadapi tekanan global terhadap sistem pangan, sekaligus memperkuat stabilitas pangan di tingkat kawasan.

Dalam konteks regional, ketahanan pangan menjadi salah satu isu non-tradisional yang terus mendapat perhatian negara-negara ASEAN. Berdasarkan laporan, negara-negara di Asia Tenggara menghadapi tantangan besar berupa ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok, fluktuasi harga global, serta ancaman perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas pertanian (Sundram, 2023).

Dalam bidang pangan, hubungan ini semakin erat sejak awal 2000-an ketika ASEAN mulai memprioritaskan ketahanan pangan sebagai bagian dari

agenda keamanan manusia (*human security*). Perdagangan beras di kawasan ASEAN merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan, terutama melalui kerangka kerja sama seperti AIFS yang mendorong koordinasi antarnegara dalam menjaga stabilitas pasokan pangan (Julitasari, n.d.). Dimensi keberlanjutan dalam kerja sama pangan ASEAN menjadi penting karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan perlindungan lingkungan dalam produksi pangan (Saraswati et al., 2023).

Kerja sama Indonesia–Thailand juga tercermin melalui peran aktif kedua negara dalam mekanisme *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR). APTERR merupakan langkah konkret ASEAN untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar global dan memperkuat solidaritas pangan di kawasan. Melalui mekanisme ini, Indonesia dapat mengakses stok beras dari Thailand dan negara lain ketika produksi domestik terganggu akibat bencana alam, perubahan iklim, atau gangguan logistik.

Dari sisi perdagangan, hubungan Indonesia dan Thailand sangat erat dalam sektor beras. Berdasarkan

penelitian, periode 2019–2022 menunjukkan peningkatan volume impor beras Indonesia dari Thailand yang berkontribusi pada stabilisasi harga pangan dalam negeri (Rohim & Ramadhony, 2025).

Selain itu, dalam studi perbandingan juga menyoroti bahwa kapasitas produksi pertanian Thailand jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia karena dukungan infrastruktur pertanian modern, sistem irigasi yang efisien, serta kebijakan ekspor yang konsisten (Herliana et al., 2025). Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kendala seperti fragmentasi lahan, ketergantungan pada cuaca, dan ketidakefisienan distribusi. Namun demikian, kerja sama kedua negara justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk belajar dari praktik terbaik (*best practices*) Thailand, seperti diversifikasi varietas padi, pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian, dan kebijakan insentif bagi petani.

Dinamika hubungan ini juga tidak lepas dari faktor global. Perubahan iklim, pandemi COVID-19, dan fluktuasi harga komoditas dunia telah menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pangan. Pandemi menjadi momen penting yang menyingkap kerentanan struktur

ketahanan pangan nasional Indonesia (Rozaki, 2021).

Berdasarkan temuan, kerja sama ASEAN dalam ketahanan pangan, termasuk antara Indonesia dan Thailand, masih menghadapi tantangan biaya transaksi (*transaction cost*) yang tinggi akibat perbedaan regulasi, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan infrastruktur logistic (Pinasthika, 2024).

Efrina (2025) menyoroti bahwa kerja sama impor beras Indonesia dari Thailand selama 2017–2023 tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas pangan nasional, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial (Efrina, 2025). Dalam jangka panjang, kerja sama ini juga diharapkan dapat berkembang menjadi kolaborasi yang lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi domestik melalui investasi bersama di sektor pertanian.

Perbandingan kebijakan pangan nasional kedua negara menunjukkan bahwa integrasi kebijakan regional dan koordinasi antarnegara menjadi kunci utama dalam mencapai ketahanan pangan kolektif di Asia Tenggara (Prasetyo et al., 2025). Dengan demikian, dinamika hubungan Indonesia dan Thailand dalam kerja sama pangan tidak

hanya mencerminkan interaksi ekonomi semata, tetapi juga strategi politik luar negeri yang diarahkan untuk memastikan keamanan pangan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan di kawasan.

Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memperkuat Kerja Sama Pangan

Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, Indonesia menempatkan diplomasi pangan sebagai bagian dari strategi politik luar negerinya. Diplomasi ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi juga pada upaya memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring kerja sama ekonomi regional. Hubungan dengan Thailand, yang dikenal sebagai eksportir beras terbesar di dunia, menjadi salah satu fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang pangan. Melalui pendekatan diplomasi ekonomi dan kerja sama multilateral di bawah payung ASEAN, Indonesia berusaha membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Kerja sama perdagangan beras antara Indonesia dan Thailand selama periode 2019–2022 mencerminkan praktik nyata dari diplomasi ekonomi Indonesia (Rohim & Ramadhony, 2025).

Diplomasi ini dilakukan melalui negosiasi bilateral antara kedua negara yang mencakup kesepakatan kuota impor, harga, serta mekanisme distribusi yang transparan.

Selain pendekatan bilateral, Indonesia juga aktif memanfaatkan forum ASEAN *Integrated Food Security Framework* (AIFS) dan ASEAN Plus Three *Emergency Rice Reserve* (APTERR) sebagai sarana diplomasi multilateral. Melalui forum ini, Indonesia memperjuangkan pentingnya solidaritas pangan di Asia Tenggara dan mendorong pembentukan cadangan beras regional untuk menghadapi potensi krisis. AIFS menjadi kerangka kerja penting bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara produsen beras seperti Thailand, sekaligus mengamankan suplai pangan domestik melalui skema kerja sama regional yang terkoordinasi (Review, 2025).

Diplomasi Indonesia juga dijalankan melalui mekanisme ekonomi dan perdagangan regional, seperti pertemuan menteri pertanian ASEAN (AMAF) dan forum ASEAN *Economic Community* (AEC). Indonesia menggunakan pendekatan kerja sama pembangunan berkelanjutan dalam

diplomasi pangan, dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Saraswati et al., 2023).

Dalam menjalankan strategi diplomasi pangan, Indonesia memanfaatkan *soft diplomacy* yang berfokus pada pertukaran pengetahuan dan teknologi pertanian. Melalui program kerja sama teknis dengan Thailand, Indonesia berusaha meningkatkan kapasitas petani dalam hal produktivitas dan efisiensi produksi. Kerja sama teknis ini mencakup pelatihan penggunaan varietas padi unggul, pengelolaan irigasi modern, serta penerapan sistem logistik digital untuk distribusi hasil pertanian. Strategi ini memperlihatkan bahwa diplomasi pangan Indonesia tidak hanya bergantung pada impor, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan domestik melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Diplomasi Indonesia di bidang pangan juga dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan dan solidaritas kawasan, terutama saat terjadi krisis pangan atau bencana. Dalam konteks ini, Indonesia dan Thailand sering berkoordinasi melalui APTERR untuk

menyalurkan bantuan beras kepada negara-negara ASEAN yang mengalami kekurangan stok pangan. Menurut *Frontiers in Sustainable Food Systems* (2023), kerja sama semacam ini menjadi wujud konkret diplomasi berbasis solidaritas regional yang memperkuat kepercayaan antarnegara dan memperkecil risiko konflik akibat ketimpangan pangan. Melalui partisipasi aktif dalam forum tersebut, Indonesia berhasil memperkuat citranya sebagai negara yang berkomitmen terhadap keamanan pangan kolektif ASEAN.

Keberhasilan diplomasi pangan Indonesia juga bergantung pada kemampuan untuk melakukan meta-sintesis kebijakan, yakni mengintegrasikan hasil riset, pengalaman kerja sama, dan kebijakan nasional ke dalam strategi regional yang konsisten. Hal ini terlihat dari bagaimana Indonesia mulai menyesuaikan arah kebijakan pangan nasionalnya dengan standar dan komitmen ASEAN, seperti dalam hal manajemen cadangan beras dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan. Pendekatan berbasis integrasi kebijakan ini memungkinkan Indonesia memperkuat posisi tawarnya di tingkat regional sekaligus menjaga kepentingan nasional di sektor pangan.

Selain itu, diplomasi pangan Indonesia juga dijalankan melalui mekanisme ekonomi inklusif, di mana pemerintah melibatkan sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan kerja sama pangan. Peran Bulog, Kementerian Pertanian, dan pelaku usaha dalam pengelolaan impor beras dari Thailand juga turut memperkuat implementasi diplomasi ekonomi di tingkat nasional. Keterlibatan aktor non-negara ini penting karena memperluas basis dukungan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di bidang pangan. Di sisi lain, Indonesia juga memanfaatkan kerja sama ini untuk meningkatkan kredibilitasnya dalam forum internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan keamanan pangan.

Meskipun demikian, strategi diplomasi Indonesia dalam kerja sama pangan dengan Thailand tidak terlepas dari tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap impor beras, yang dapat melemahkan posisi tawar Indonesia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi domestik. Selain itu, perubahan kebijakan ekspor Thailand akibat fluktuasi harga global juga dapat

berdampak langsung terhadap stabilitas pangan Indonesia. Diplomasi pangan di ASEAN menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan nasional dan biaya transaksi yang tinggi, sehingga dibutuhkan peningkatan koordinasi, transparansi data, dan kesepakatan kebijakan jangka panjang agar kerja sama dapat berjalan efektif (Pinasthika, 2024).

Secara keseluruhan, strategi diplomasi Indonesia dalam memperkuat kerja sama pangan dengan Thailand mencerminkan perpaduan antara diplomasi ekonomi, diplomasi pembangunan, dan diplomasi kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya berupaya menjamin ketersediaan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas regional dan solidaritas ASEAN. Strategi ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara yang berperan aktif dalam menciptakan keamanan pangan berkelanjutan di Asia Tenggara. Seperti ditegaskan oleh Rozaki (2021), kerja sama pangan dan diplomasi ekonomi yang efektif menjadi pondasi penting dalam memperkuat daya tahan nasional terhadap krisis global, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Implementasi Kerja Sama dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan

Kerja sama pangan antara Indonesia dan Thailand tidak hanya bersifat konseptual atau terbatas pada diplomasi, tetapi telah diimplementasikan melalui berbagai program konkret di tingkat bilateral maupun multilateral. Implementasi kerja sama ini mencakup bidang perdagangan beras, pengembangan riset dan teknologi pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga koordinasi dalam forum ketahanan pangan regional seperti APTERR dan AIFS. Semua inisiatif ini berorientasi pada pencapaian empat pilar utama ketahanan pangan yang dikemukakan oleh FAO (1996), yakni *availability* (ketersediaan), *access* (akses), *utilization* (pemanfaatan), dan *stability* (stabilitas).

Integrasi pasar beras di ASEAN berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan melalui distribusi yang lebih efisien antarnegara, sehingga mampu mengurangi ketimpangan pasokan pangan di kawasan (Daliani et al., 2024).

Salah satu bentuk kerja sama paling signifikan adalah dalam sektor perdagangan beras. Berdasarkan hasil penelitian, impor beras Indonesia dari

Thailand meningkat secara signifikan pada periode 2019–2022 (Rohim & Ramadhony, 2025). Thailand, sebagai eksportir beras premium dan medium terbesar di Asia Tenggara, memasok sebagian besar kebutuhan beras Indonesia ketika produksi domestik tidak mencukupi. Hubungan perdagangan ini memiliki dua fungsi strategis: pertama, sebagai instrumen untuk menjaga ketersediaan beras nasional (*availability*); dan kedua, sebagai sarana untuk menstabilkan harga pangan domestik (*stability*). Melalui mekanisme perdagangan yang diatur secara bilateral, Indonesia dapat memastikan pasokan beras tetap aman meskipun menghadapi anomali cuaca atau gagal panen di dalam negeri.

Selain mekanisme perdagangan dan *Asean Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR), kolaborasi diperluas melalui penguatan teknis di bidang pertanian. Berdasarkan kajian Herliana et al. (2025), kerja sama teknis tersebut mencakup pertukaran pengetahuan tentang teknologi irigasi, pengelolaan lahan, dan penggunaan varietas padi unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim. Indonesia banyak belajar dari sistem pertanian Thailand yang lebih efisien dan berbasis teknologi,

seperti penerapan smart farming dan penggunaan sistem informasi digital untuk pemantauan produksi. Kolaborasi ini dilakukan melalui pertemuan teknis antar kementerian pertanian, pertukaran ahli, dan pelatihan petani. Implementasi kerja sama ini memiliki dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok di Indonesia, meskipun belum sepenuhnya optimal di seluruh wilayah.

Kerja sama juga terlihat dalam partisipasi aktif kedua negara di bawah ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Program ini dirancang untuk menyediakan cadangan beras darurat bagi negara-negara anggota ASEAN yang menghadapi bencana atau krisis pangan. Indonesia dan Thailand sama-sama menjadi kontributor penting dalam program ini, di mana Thailand berperan sebagai negara penyedia stok beras, sementara Indonesia sebagai salah satu penerima manfaat dan juga anggota aktif dalam perencanaan distribusi. Mekanisme APTERR memungkinkan terjadinya distribusi beras cepat lintas negara ketika krisis pangan terjadi, sehingga mencegah potensi kelaparan dan menjaga stabilitas harga. Keikutsertaan aktif Indonesia dalam APTERR memperlihatkan

pergeseran diplomasi pangan dari sekadar hubungan bilateral menjadi kerja sama kolektif berbasis solidaritas regional.

Selain APTERR, kerja sama Indonesia–Thailand juga diwujudkan melalui ASEAN *Integrated Food Security Framework* (AIFS) dan *Strategic Plan of Action on Food Security* (SPA-FS). Kedua mekanisme ini bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan pangan antarnegara ASEAN, termasuk dalam hal pengumpulan data pangan, riset pertanian, dan pembangunan kapasitas petani. Berdasarkan analisis, implementasi AIFS mencerminkan perubahan paradigma dari ketahanan pangan nasional menjadi ketahanan pangan regional, di mana setiap negara berkontribusi untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan inklusif (Saraswati et al., 2023). Dalam konteks ini, Indonesia dan Thailand menjadi dua aktor utama yang mendorong integrasi kebijakan pangan kawasan, khususnya dalam bidang beras sebagai komoditas strategis.

Implementasi kerja sama juga terlihat pada sektor riset dan inovasi pertanian. Prasetyo et al. (2025) melalui studi meta-synthesis kebijakan pangan Indonesia dan Thailand menegaskan

bahwa kedua negara mulai memperkuat kolaborasi dalam bidang riset akademik dan kebijakan berbasis data. Salah satu bentuknya adalah proyek penelitian bersama terkait efisiensi rantai pasok beras, adaptasi pertanian terhadap perubahan iklim, dan diversifikasi sumber pangan (Prasetyo et al., 2025). Hasil dari kerja sama ini berkontribusi pada peningkatan kualitas data dan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Kerja sama juga mencakup aspek logistik dan manajemen distribusi pangan. Berdasarkan analisis, salah satu kendala utama ketahanan pangan di ASEAN adalah tingginya transaction cost yang timbul dari perbedaan regulasi dan infrastruktur antarnegara (Pinasthika, 2024). Indonesia dan Thailand mencoba mengatasi hal ini melalui peningkatan koordinasi dalam transportasi maritim, penguatan pelabuhan ekspor-impor, dan digitalisasi sistem logistik. Thailand, dengan pengalaman ekspor beras yang sudah maju, memberikan dukungan teknis bagi Indonesia untuk memperbaiki efisiensi rantai pasok pangan nasional.

Selain dampak ekonomi, kerja sama Indonesia–Thailand juga memberikan dampak sosial dan politik. Stabilitas pasokan beras yang terjaga berkat impor

dari Thailand berkontribusi pada pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia (Efrina, 2025).

Hubungan Indonesia–Thailand telah memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan, baik secara nasional maupun regional. Kerja sama ini memperkuat aspek ketersediaan pangan melalui perdagangan dan cadangan regional, meningkatkan akses dan efisiensi distribusi melalui kolaborasi logistik, serta memperluas pemanfaatan teknologi dan riset pertanian untuk mendukung produksi berkelanjutan. Selain itu, kerja sama ini berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia dengan menjaga harga pangan tetap terkendali. Sejalan dengan pandangan (Rozaki, 2021), keberhasilan ketahanan pangan suatu negara tidak hanya diukur dari kemampuan produksi, tetapi juga dari sejauh mana negara tersebut mampu membangun jaringan kerja sama internasional yang adaptif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang (Rozaki, 2021).

Stabilitas harga pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan, karena kenaikan harga yang signifikan dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperbesar

risiko kerawanan pangan, khususnya di negara berkembang (Headey & Fan, 2008). Oleh karena itu, kerja sama perdagangan beras antara Indonesia dan Thailand berperan penting dalam menjaga kestabilan harga di pasar domestik.

Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Kerja Sama

Meskipun kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam bidang ketahanan pangan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, berbagai tantangan masih dihadapi dalam proses implementasi dan keberlanjutannya. Ketahanan pangan di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produktivitas pertanian, kebijakan perdagangan, dan kondisi ekonomi domestik, sehingga diperlukan kerja sama regional untuk memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan (Handayani et al., 2024). Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis dan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, kebijakan, dan lingkungan yang memengaruhi efektivitas kerja sama jangka panjang.

1. Tantangan Kerja Sama

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam kerja sama ini adalah ketimpangan kapasitas produksi dan teknologi pertanian antara Indonesia dan Thailand. Berdasarkan kajian, Thailand masih lebih unggul dalam penggunaan teknologi pertanian modern seperti precision agriculture, sistem informasi pertanian digital, dan mekanisasi panen. Sementara itu, sebagian besar petani di Indonesia masih bergantung pada sistem pertanian tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah. Kesenjangan ini membuat alih teknologi berjalan lambat, terutama di tingkat petani kecil yang sulit mengakses permodalan dan pendidikan teknologi pertanian.

Selain itu, tantangan lain muncul dari ketergantungan Indonesia terhadap impor beras Thailand. Menurut Rohim dan Ramadhony (2025), peningkatan impor beras Indonesia dari Thailand memang membantu menjaga stabilitas pasokan jangka pendek, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kemandirian pangan nasional (Rizfi Nur Rohim & Ramadhony, 2025). Ketergantungan terhadap impor pangan merupakan salah satu tantangan

dalam mencapai kemandirian pangan nasional, meskipun di sisi lain perdagangan internasional tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam jangka pendek (Depth, 2015).

Di sisi kelembagaan, terdapat kendala dalam hal koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam kerja sama internasional bidang pangan. Kebijakan pangan di Indonesia sering kali tumpang tindih antara kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional. Kondisi ini menyebabkan implementasi kerja sama bilateral menjadi tidak sinkron dan memerlukan waktu yang lebih lama. Di Thailand sendiri, birokrasi yang kuat dan terpusat justru membuat proses kerja sama lebih efisien, tetapi perbedaan sistem birokrasi ini kadang menimbulkan kesenjangan koordinasi antarnegara.

Tantangan berikutnya terkait dengan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Perubahan iklim global berdampak besar terhadap produktivitas pertanian di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan Thailand. Selain itu, tantangan juga datang dari fluktuasi harga pangan global dan ketegangan geopolitik internasional. Situasi

geopolitik seperti perang dagang atau konflik global dapat memengaruhi pasokan beras dan bahan pangan lainnya di pasar internasional.

2. Prospek Keberlanjutan Kerja Sama

Di balik tantangan-tantangan tersebut, terdapat prospek yang cukup cerah bagi keberlanjutan kerja sama Indonesia–Thailand dalam bidang ketahanan pangan. Integrasi ekonomi kawasan ASEAN memberikan peluang besar dalam memperkuat ketahanan pangan, karena kerja sama regional dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi krisis pangan dan memperkuat sektor pertanian (Yudhatama et al., 2021). Salah satu faktor pendukung utama adalah semakin kuatnya komitmen kedua negara terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama tujuan ke-2 yaitu Zero Hunger.

Arah kebijakan pangan ASEAN saat ini sedang bergerak ke arah integrasi regional dan inovasi teknologi pertanian digital, di mana Indonesia dan Thailand memiliki posisi strategis sebagai pemimpin kawasan. Indonesia dapat berperan sebagai pusat pengembangan

riset dan inovasi sosial dalam ketahanan pangan, sedangkan Thailand menjadi penyedia pengalaman teknis dan teknologi pertanian yang sudah matang (Saraswati et al., 2023).

Selain itu, kerja sama ini memiliki potensi untuk diperluas ke sektor diversifikasi pangan dan bioekonomi. Masa depan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga pada kemampuan negara mengembangkan sumber pangan alternatif seperti sorgum, jagung, dan umbi-umbian (Rozaki, 2021). Dalam konteks ini, Indonesia dan Thailand dapat memperluas kolaborasi riset di bidang pangan fungsional, bioteknologi pertanian, dan pangan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya berorientasi pada perdagangan beras, tetapi juga pada penciptaan sistem pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Dari sisi sosial, peluang keberlanjutan kerja sama juga terletak pada penguatan peran masyarakat dan petani muda dalam sektor pangan. Semakin banyak program pelatihan dan pertukaran yang melibatkan generasi muda petani dari kedua Negara. Partisipasi mereka penting untuk menciptakan generasi baru pelaku

pertanian yang adaptif terhadap teknologi dan perubahan pasar global. Jika program ini terus dikembangkan, maka kerja sama Indonesia–Thailand dapat bertransformasi dari sekadar hubungan antarnegara menjadi bentuk *people-to-people cooperation* yang berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka prospek baru dalam transformasi sistem pangan ASEAN. Berdasarkan hasil kajian Herliana et al. (2025), penggunaan big data, Internet of Things (IoT), dan sistem pemantauan pangan berbasis satelit dapat meningkatkan transparansi rantai pasok dan efisiensi logistik antarnegara. Indonesia dan Thailand dapat memanfaatkan inovasi ini untuk menciptakan sistem pangan yang lebih cepat, adaptif, dan berdaya saing tinggi (Herliana et al., 2025).

Terakhir, keberlanjutan kerja sama ini akan sangat bergantung pada penguatan kelembagaan dan kebijakan bersama. Indonesia dan Thailand perlu memperkuat mekanisme koordinasi melalui forum seperti *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF)* dan *ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB)*. Penguatan kelembagaan ini akan memastikan bahwa kerja sama

pangan tidak berhenti pada kesepakatan politik semata, tetapi juga terimplementasi dalam kebijakan nyata dan terukur di lapangan.

Prospek keberlanjutan kerja sama pangan Indonesia–Thailand sangat terbuka lebar apabila kedua negara mampu mengatasi tantangan yang ada dengan pendekatan inovatif dan inklusif. Kolaborasi berbasis teknologi, penguatan kapasitas petani, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan menjadi kunci utama bagi terwujudnya ketahanan pangan yang tahan terhadap krisis di masa depan. Sejalan dengan visi FAO (2022), kerja sama internasional seperti ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga untuk menciptakan sistem pangan global yang adil, tangguh, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Pembatasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama pangan antara Indonesia dan Thailand berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup perdagangan beras, tetapi juga melibatkan diplomasi ekonomi,

transfer teknologi, serta kolaborasi riset yang memperkuat ketersediaan dan stabilitas pangan. Sinergi ini mencerminkan bentuk interdependensi regional yang mendukung sistem pangan ASEAN yang lebih terintegrasi dan resilien.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan terhadap impor beras, kesenjangan kapasitas teknologi pertanian, serta dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi domestik melalui inovasi pertanian, modernisasi sistem irigasi, serta peningkatan efisiensi distribusi pangan. Selain itu, optimalisasi kerja sama dengan Thailand perlu diarahkan tidak hanya pada perdagangan, tetapi juga pada penguatan transfer teknologi dan pengembangan riset bersama yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder yang bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber yang ada, sehingga tidak sepenuhnya menangkap dinamika empiris di tingkat lapangan. Selain itu, fokus penelitian yang terbatas pada

hubungan bilateral Indonesia–Thailand belum mencakup analisis komparatif dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer serta memperluas cakupan analisis secara regional guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait ketahanan pangan di Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- ASEAN responses to COVID-19 for assuring food security (pp. 83–118). (2021). <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.001>
- Daliani, H. R., Amelia, S., Suri, S. A., Safitri, A., & Nasihah, A. (2024). *The Role of ASEAN ' s Rice Commodity Market Integration in Economic Stability and Food Security*. 04(01), 29–38.
- Depth, I. N. (2015). *Food self-sufficiency and international trade: a false dichotomy?* 1–11.
- Efrina, N. (2025). *Analisis Kerjasama Impor Beras Indonesia Dari Thailand Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Pangan Nasional (2017-2023)*. 1(May), 121–126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347>.Agricom.id
- Handayani, T. A., Aida, N., & Yuliawan, D. (2024). *Determinants of Food Security in ASEAN Rice-Producing Countries*. 0(09), 6055–6062. <https://doi.org/10.47191/jefms/v8>
- Headey, D., & Fan, S. (2008). *Anatomy of a crisis : the causes and consequences of surging food prices*. 39. <https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2008.00345.x>
- Herliana, S., Ratnaningtyas, S., Aina, Q., Zuraida, U., Sutardi, A., & Qorina, S. (2025). *Comparison Between Food Security in Indonesia and Thailand: Rice Export and Import*. *Journal of The Community Development in Asia*, 8(1), 97–115. <https://doi.org/10.32535/jcda.v8i1.3666>
- Julitasari, E. N. (n.d.). *The Overview of Asean Rice Trade Toward Asean Integrated Food Security (AIFS)*. 2012.
- Konsep, K. P., & Dan, P. (2002). *Ketahanan pangan: konsep, pengukuran dan strategi*. 20(1), 12–24.
- Lin, H.-I., Yu, Y.-Y., Wen, F.-I., & Liu, P.-T. (2022). *Status of Food Security in East and Southeast Asia and Challenges of Climate Change*. *Climate*, 10(3), 40. <https://doi.org/10.3390/cli10030040>
- Pinasthika, R. E. (2024). *Transaction Cost Analysis of ASEAN Food Security Cooperation on Rice Commodity*. *Nation State: Journal of International Studies*, 7(2), 86–106. <https://doi.org/10.24076/nsjis.v7i2.1588>
- Prasetyo, A. S., Dooley, K. E., Widyastuti, K., & Firdauzi, A. (2025). *Comparing national food security policies in Indonesia and Thailand: a systematic meta-synthesis approach*. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9(September), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1676641>
- Review, N. L. (2025). *Management Of Food Security In Asean Economic*

Community And The Implication To Indonesia. 6(2), 170–177.

<https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.9605>

Rohim, Rizfi Nur & Ramadhony, F. (2025). Indonesia'S Economic Interest in Rice Trade Cooperation With Thailand 2019-2022. *Moestopo International Review on Social, Humanities, and Sciences*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.32509/mirshus.v5i1.83>

Rozaki, Z. (2020). free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID- Food security challenges and opportunities in indonesia post COVID-19. *January*.

Rozaki, Z. (2021). Food security challenges and opportunities in indonesia post COVID-19. *Advances in Food Security and Sustainability*, 6, 119–168. <https://doi.org/10.1016/bs.af2s.2021.07.002>

Saraswati, D. P., Darmastuti, S., & Satrio, J. (2023). ASEAN Cooperation in Creating Sustainable Development in the Food Sector. *Journal of Development Research*, 7(2), Process. <https://doi.org/10.28926/jdr.v7i2.342>

Sundram, P. (2023). Food security in ASEAN: progress, challenges and future. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1260619>

The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. (2021). <https://www.fao.org/interactive/state-of-food-security-nutrition/2021/en/>

Yudhatama, P., Nurjanah, F., & Diaraningtyas, C. (2021). Food Security , Agricultural Sector Resilience , and Economic Integration : Case Study of. 22(April).